

## BAB V

### PENYELENGGARAAN

### DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Provinsi kepada Kota/Kabupaten atau dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Realisasi pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang diterima pada tahun 2017 dapat dijelaskan dalam uraian berikut.

#### **A. Dasar Hukum Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan**

Dasar hukum pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan adalah sebagai berikut :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah diwilayah Provinsi;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

## **B. Dekonsentrasi**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pasal 1 ayat (14) disebutkan bahwa Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi

vertikal pusat di daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Penyelenggaraan dekonsentrasi dilakukan melalui pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

# 1. Kementerian/Lembaga Pemberi Dekonsentrasi dan Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Penyelenggaraan Dekonsentrasi yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 bersumber dari 20 Kementerian dan dilaksanakan oleh 19 Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1  
Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi dan Perangkat Daerah Pelaksana pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
1	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	758,755,000	672,498,950	88.63
2	Kementerian Pertanian	(1) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (2) Dinas Perkebunan Prov. Kaltim	25,998,301,000	20,909,734,643	80.43
3	Kementerian Perindustrian	Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Prov. Kaltim	1,960,000,000	1,879,634,600	95.90
4	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kaltim	7,795,204,000	7,066,748,246	90.66
5	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan Prov. Kaltim	24,786,005,000	22,108,731,349	89.20
6	Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kaltim	5,727,209,000	5,606,486,614	97.89
7	Kementerian Sosial	Dinas Sosial Prov. Kaltim	12,447,049,000	11,715,815,766	94.13
8	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1) Dinas Kehutanan Prov. Kaltim (2) Badan Lingkungan Hidup Prov. Kaltim	1,345,400,000	1,194,609,810	88.79
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kaltim	2,374,397,000	2,290,414,330	96.46

10	Kementerian Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kaltim	1,357,000,000	1,289,648,248	95.04
11	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian, perdagangan dan Koperasi Prov. Kaltim	2,270,653,000	2,256,091,768	99.36
12	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Kaltim	2,220,000,000	2,205,057,819	99.33
13	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	840,614,000	835,803,199	99.43
14	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim	1,287,013,000	1,201,910,811	93.39
15	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Badan Perijinan Dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Prov. Kaltim	300,000,000	248,586,236	82.86
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Prov. Kaltim (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kaltim	23,133,055,000	12,583,501,037	54.40
17	Arsip Nasional Republik Indonesia	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Prov. Kaltim	307,286,000	272,178,950	88.58
18	Kementerian Perdagangan	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Prov. Kaltim	3,187,452,000	2,977,302,640	93.41
19	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kaltim	3,113,389,000	2,871,275,149	92.22
20	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Sekretariat Daerah Prov. Kaltim	123,076,000	-	-
<b>JUMLAH</b>			<b>121,331,858,000</b>	<b>100,186,030,165</b>	<b>82.57</b>

Sumber: Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

Jumlah anggaran penyelenggaraan Dekonsentrasi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 121.331.858.000 bersumber dari APBN, menurun dibanding dengan tahun anggaran 2016 yang berjumlah sebesar Rp.202,875,628,000,- dengan total realisasi Rp. 100,186,030,165 atau

82,57 %. dapat dilihat pada tabel 5.2.

**Tabel 5.2**  
**Alokasi Anggaran Dekonsentrasi yang Diterima**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan 2017**

<b>No.</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Anggaran 2016 (Rp)</b>	<b>Anggaran 2017 (Rp)</b>
1.	Kementerian Dalam Negeri	5,020,548,000	758,755,000
2.	Kementerian Pertanian	49,019,768,000	25,998,301,000
3.	Kementerian Perindustrian	2,691,000,000	1,960,000,000
4.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
5.	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	14,221,333,000	7,795,204,000
6.	Kementerian Kesehatan	51,886,391,000	24,786,005,000
7.	Kementerian Ketenagakerjaan	8,696,237,000	5,727,209,000
8.	Kementerian Sosial	15,659,864,000	12,447,049,000
9.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7,814,126,000	1,345,400,000
10.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	9,908,293,000	2,374,397,000
11.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1,002,114,000	-
12.	Kementerian Pariwisata	6,350,000,000	1,357,000,000
13.	Kementerian Koperasi dan Pengusaha Kecil Dan Menengah	2,023,887,000	2,270,653,000
14.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	780,000,000	2,220,000,000
15.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional	1,006,291,000	840,614,000
16.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN	4,148,750,000	-
17.	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	693,385,000	1,287,013,000
18.	Badan Koordinasi Penanaman Modal	579,389,000	300,000,000
19.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	12,935,777,000	23,133,055,000
20.	Arsip Nasional Republik Indonesia	414,043,000	307,286,000
21.	Kementerian Perdagangan	2,438,450,000	3,187,452,000
22.	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	5,020,548,000	3,113,389,000
23.	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	49,019,768,000	123,076,000
<b>Total</b>		<b>202,875,628,000</b>	<b>121,331,858,000</b>

*Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 dan Tahun 2017*

## **2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya**

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Dekonsentrasi yang diterima Perangkat Daerah (PD) ditingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebanyak 47 program dan 132 kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Dekonsentrasi yang dilaksanakan oleh PD Provinsi Kalimantan Timur antara lain:

1. Program bina administrasi kewilayahan, kegiatan : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja sama Daerah; Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran; Penataan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah, dan Toponimi. Hasil pelaksanaan program kegiatan adalah Layanan pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerja sama daerah; Peningkatan Kapasitas terhadap Aparatur penanggulangan bencana dan kebakaran; Layanan penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, dan toponimi.
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; Peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura; Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian; Peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian; Peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan; Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, meliputi kegiatan : Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan; Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan; Pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; Pengembangan sistem perbenihan hortikultura; Pengembangan sistem perlindungan hortikultura; Pengelolaan air irigasi untuk pertanian; Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian; Fasilitasi pupuk dan pestisida; Fasilitasi pembiayaan pertanian; Pemantapan sistem penyuluhan pertanian; Dukungan perlindungan perkebunan; Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan

umbi; Pengelolaan produksi tanaman sereal; Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan; Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pengelolaan Harga beras oleh Gapoktan mengikuti standar pusat perkilo yaitu Rp. 9.000,-; Lokasi PUPM ada di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Paser; Menghitung ketersediaan Pangan di Kalimantan Timur menggunakan aplikasi NBM (Neraca Bahan Makanan); Peta kerawanan pangan; Bantuan kepada kelompok tani/dasawisma untuk membuat demplot, pengairan dan persemaian yang sederhana serta pengembangan di pekarangan, lokasi ada di Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 6 KWT, Kabupaten Kutai Barat sebanyak 6 KWT, Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 5 KWT dan Kota Samarinda sebanyak 4 KWT; Gerakan pengendalian OPT hortikultura; Jumlah sertifikasi benih hortikultura varietas atau komoditi jeruk, Durian, Lai dan Rambutan yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kota samarinda.

3. Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, kegiatan: Pengembangan sistem perbenihan hortikultura; Pengembangan sistem perlindungan hortikultura; Peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Pengembangan Kawasan Bawang Merah Kaltim yang terealisasi 100 Ha tersebar di Kabupaten Paser dengan luasan 20 Ha, Kabupaten Berau dengan luasan 30 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara dengan luasan 20 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luasan 20 Ha dan Kota Balikpapan dengan luasan 10 Ha; Pengawasan peredaran benih hortikultura di Kabupaten/Kota; Gerakan Pengendalian OPT Hortikultura di Kabupaten/Kota.
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan: Pengelolaan Air Irigasi Untuk

Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitas Pupuk dan Pestisida; Fasilitas Pembiayaan Pertanian; Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Layanan dan Pembinaan Kegiatan dilingkup Kegiatan Irigasi Pertanian; Layanan dan pembinaan kegiatan lingkup alsintan; Layanan dukungan manajemen eselon I; Data layanan operasional pengawasan pupuk subsidi; Layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian.

5. Program peningkatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, melalui kegiatan: Pemantapan sistem penyuluhan pertanian. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terlaksananya sekolah lapang yang diikuti oleh 1.000 petani yang tersebar di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.
6. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, melalui kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi; Pengelolaan produksi tanaman sereal; Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan; Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI; Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Dokumen Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi; Dokumen Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal; Fasilitas Perbanyak Benih Sumber Tanaman Pangan; Fasilitas penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI.
7. Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, melalui kegiatan: Dukungan perlindungan perkebunan; Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya ditjen perkebunan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah :



- Fasilitasi teknis dukungan perlindungan perkebunan selama 12 Bulan.
  - Rapat Koordinasi pembangunan Teknis.
  - CP/CL pengembangan pangan lahan perkebunan, pembinaan dan koordinasi.
  - Pemantapan sistem akuntansi dan verifikasi pelaksanaan anggaran
  - Penyelesaian asset bermasalah dan penanganan asset.
  - Pengendalian Percepatan pengembalian kredit petani proyek UPP perkebunan.
  - Sensus Inventarisasi BMN.
  - Pertemuan Sinkronisasi data perkebunan angka tetap 2016, angka sementara 2017 dan angka estimasi 2018 dengan Kabupaten/Kota.
  - Riview pelaksanaan SPI, Monitoring dan evaluasi pelaporan kinerja.
8. Program penumbuhan dan pengembangan industri kecil dan menengah, kegiatan: Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah Penguatan penataan struktur industri yang mendorong keterkaitan usaha industri hulu dan hilir serta keterkaitan antara IKM dan industri besar di 10 Kabupaten/Kota; Pembangunan dan mengembangkan kawasan industri di 3 (tiga) Kawasan yaitu Kariangau, Maloy dan Bulu Minung.
9. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan: Peningkatan Pelayanan Prima dalam Perencanaan, Penganggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Rapat Koordinasi perencanaan Pendidikan; Workshop data transfer daerah.

10. Program pendidikan dasar dan menengah, meliputi kegiatan: Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; Pembinaan Sekolah Menengah Atas; Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah :

- Membawa peserta dan pendamping lomba O2SN ke Tingkat Nasional sebanyak 14 orang.
- Memberangkatkan peserta dan pendamping lomba FLS2N Tingkat Nasional sebanyak 14 orang.
- Menyelenggarakan seleksi lomba-lomba ABK TK. Provinsi sebanyak 312 orang.
- Menyelenggarakan Rakor Penyusun Program & Anggaran PKLK 2017 sebanyak 92 orang.
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi PKLK sebanyak 41 orang.
- Rapat Koordinasi Diseminasi (Kepsek Penerima Dana BOS SMA 10 Kabupaten/Kota).
- Kemah Pramuka (Siswa-siswi SMA dari 10 Kabupaten /Kota se-Kaltim).
- Pengiriman Siswa Lomba OSN Tingkat Nasional di Pekanbaru.
- Pengiriman Siswa Lomba O2SN Tingkat Nasional di Medan, Sumatera Utara.
- Pengiriman Siswa Lomba FLS2N Tingkat Nasional di Kupang, NTT.
- Pengiriman Siswa Lomba LDBI dan NSDC Tingkat Nasional di Jakarta.
- Pengiriman Siswa Kawah Kepemimpinan Pelajar (KKP) di Bogor, Jawa Barat.
- Pemantauan pengelolaan dana BOS, PIP Sarpras dan DAK Program Pembinaan SMA di 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.
- Pengolahan Laporan Pemantauan pengelolaan dana BOS, PIP

Sarpras dan DAK Program Pembinaan SMA.

- Pengolahan analisis hasil Kegiatan OSN Tingkat Nasional di Pekanbaru Riau yang dilaksanakan di Balikpapan.
- Pengolahan dan analisis hasil FLS2N di Balikpapan; Pengolahan dan analisis hasil O2SN di Balikpapan.
- Pengolahan dan analisis hasil Debat Bahasa Indonesia (LDBI) dan Debat Bahasa Inggris (NSDC) di Balikpapan.
- Telah dilaksanakan Lomba LKS siswa SMK di Tingkat Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 5 Bidang Lomba antara lain : *Automobile Technology*, *Welding*, *Ladies Dressmaking*, *Agronomi* dan *Livestock* yang diikuti Siswa SMK sebanyak 50 orang dan Guru Pendamping sebanyak 50 orang dari 10 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Samarinda.
- Telah diikuti dan dikirim peserta lomba LKS tingkat nasional di Surakarta sebanyak 29 Bidang Lomba yang diikuti dari 54 Bidang yang dilombakan di tingkat nasional dengan jumlah siswa 29 orang dan guru pendamping dari sekolah sebanyak 29 orang dan pendamping provinsi sebanyak 11 orang dan Ketua Kontingen 1 orang, Kontingen Kalimantan Timur dalam LKS Tingkat Nasional Menduduki peringkat ke 18 dari 34 provinsi dengan perolehan medali Juara 1 untuk bidang lomba Farmasi, Juara 2 untuk Bidang lomba *Ladies and Men's hairdressing* dan Juara 3 Bidang *Fishery*.
- Telah diikuti dan dikirim peserta Lomba Festival dan lomba seni SMK Tingkat Nasional di Kupang sebanyak 8 siswa peserta lomba diantaranya Bidang lomba Seni menyanyi Solo, Bidang Lomba Seni Gitar Klasik , Bidang Seni Tari Tradisional dan Bidang Seni Cipta Baca Puisi dan Guru Pendamping dan Pendamping Provinsi. Kontingen Provinsi Kalimantan Timur mendapat predikat prestasi terbaik 3 dari Bidang lomba Seni

solo Gitar Tunggal yang diwakili dari SMKN 1 Bontang.

- Telah Diikuti dan dikirim peserta lomba O2SN siswa SMK Tingkat di Medan Provinsi Sumatera Utara sebanyak 9 siswa Atlit, 5 Orang Pelatih dan 12 Pendamping Provinsi dan pendamping sekolah cabang lomba yang diikuti antara lain: Karate Putra, Karate Putri, Pencak Silat Putra, Pencak Silat Putri, Bulu Tangkis Putra, Bulu Tangkis Putri, Bulu tangkis Ganda Campuran dan Renang Putra. Provinsi Kalimantan Timur dalam O2SN Tingkat Nasional tahun 2017 memperoleh prestasi berada pada urutan ke 16 dari 34 provinsi yang mengikuti dengan perolehan medali antara lain: Pencak Silat Putri sebagai Juara 2 untuk katagori Seni, Karate Putra sebagai Juara 2 Kelas Kata, Karate Putra sebagai Juara Kumite dan Bulu Tangkis Tunggal Putra sebagai Juara 3.
- Telah dilaksanakan penggandaan Bahan Ujian Nasional Produktif sebanyak 244.199 halaman dan telah dikirim dan di distribusikan ke sekolah penyelenggara ujian Nasional SMK se-Kalimantan Timur, melalui Bidang Pembinaan SMK Kalimantan Timur telah melaksanakan pengiriman naskah soal Ujian Nasional Produktif melalui ketua MKKS SMK yang ada di Kabupaten/Kota yang selanjutnya diteruskan ke sekolah penyelenggara ujian pada tanggal 27 Maret 2017.
- Telah dilaksanakan Rakor penguatan Program pendidikan menengah Kejuruan Tahun 2017 yang diikuti oleh semua MKKS SMK se-Kalimantan Timur, para Kepala Sekolah SMK Negeri se-Kalimantan Timur dan para Pengelola dana BOSNAS SMK se-Kalimantan Timur. Kegiatan ini bertujuan Mensosialisasikan Program Pembinaan SMK Disdikbud Provinsi Kalimantan Timur.
- Mensosialisasikan arah kebijakan Dirjen Dikdasmen terkait dengan Pembinaan SMK dan Kurikulum 2013.

- Membahas Rencana Pelaksanaan Program Kegiatan SMK.
  - Mensosialisasikan dan Mengkoordinasikan Program Bosnas Tahun 2017.
  - Mensosialisasikan Pengutan Implementasi Program BOSNAS SMK Tahun 2017.
11. Program guru dan tenaga kependidikan, melalui kegiatan: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Hasil pelaksanaan Kegiatan yaitu Sosialisasi pengembangan keprofesian yang dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota agar dapat jumlah peserta yang mendapat informasi merata; Sosialisasi uji kompetensi guru dan Tenaga Pendidik di 10 Kabupaten/Kota agar guru dan tenaga pendidik dapat melakukan persiapan sebelum mengikuti ujian kompetensi guru dan Tenaga Pendidik; Pelaksanaan ujian kompetensi guru dan tenaga pendidik di 10 Kabupaten/Kota.
12. Program Pelestarian Budaya, meliputi kegiatan: Pembinaan Kesenian. Hasil pelaksanaan kegiatan Mensosialisasikan kesenian dengan dewan kesenian daerah di sekolah; Pementasan dan pameran seni di 10 sekolah.
13. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan; melalui kegiatan: Pembinaan administrasi kepegawaian; Pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan barang milik negara; Perencanaan dan penganggaran program pembangunan kesehatan; Pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan, rumah tangga, keuangan, dan gaji; Pengelolaan data dan informasi kesehatan; Peningkatan kesehatan jemaah haji. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Kegiatan Rakontek perencanaan di pusat, Rakontek Sistem Informasi kesehatan (SIK) di pusat, Monitoring perencanaan Kabupaten/Kota, monitoring dan evaluasi SIK di Kabupaten/Kota, tersedianya data informasi kesehatan Prov Kaltim.

14. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, melalui kegiatan: Bimtek/Monev pelaksanaan JKN di Kabupaten/Kota, dengan hasil kegiatan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembiayaan kesehatan dan JKN/KIS di 10 Kabupaten/Kota.
15. Program pembinaan kesehatan masyarakat, melalui kegiatan: Pembinaan Gizi Masyarakat, Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga; Pembinaan Kesehatan Keluarga; Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Penyehatan Lingkungan. Hasil pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:
- Penyediaan gudang PMT Bumil KEK & Balita kurus di Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Berau, Bontang.
  - Pelacakan Balita kurus dan gizi buruk di 10 Kabupaten/Kota.
  - Pembekalan pemantauan status gizi untuk 10 Kabupaten/Kota.
  - Orientasi kesehatan olahraga untuk 10 Kabupaten/Kota.
  - Tes kebugaran jemaah haji pada 1.412 orang di 10 Kabupaten Kota.
  - mendapat Bimbingan Teknis program kesjaor di 10 Kabupaten/Kota.
  - Orientasi KIE Kespro Catin untuk , 4000 sampel pemeriksaan SHK yang diperiksa.
  - Orientasi penanganan kelainan tumbuh kembang balita untuk 10 Kabupaten/Kota.
  - Orientasi Tim pembina UKS untuk 10 Kabupaten/Kota.
  - Penggalangan komitmen terkait GERMAS di 10 Kabupaten/Kota.
  - Pembentukan Forum Germas yaitu Kutai Timur Dan Kutai barat.
  - Orientasi terpadu Kesling untuk 10 Kabupaten/Kota.
  - Sosialisasi lintas program dan lintas sektor Pengawasan

Sarana Air Minum Pengawasan untuk 10 Kabupaten/Kota.

16. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan, melalui kegiatan: Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Primer; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan; Pembinaan Pelayanan Kesehatan Tradisional; Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Terlaksananya Lokakarya penetapan jejaring sistem rujukan pemeliharaan dan kalibrasi SPA di fasyankes untuk 10 Kabupaten/Kota.
- Monitoring dan evaluasi validasi data ASPAK.
- Perencanaan kebutuhan pemenuhan standar dan akreditasi pada 14 Rumah Sakit Pemerintah.
- Pelatihan peningkatan kemampuan teknis petugas laboratorium tingkat lanjut untuk RS kelas C dan D untuk di 10 Kabupaten/Kota.
- Pertemuan teknis pembentukan PSC 119 di Samarinda.
- 10 Kabupaten/Kota telah mengikuti tatalaksana peningkatan kapasitas puskesmas dalam asuhan mandiri untuk mendukung program kesehatan keluarga.
- Pelayanan kesehatan bergerak di Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
- Pelatihan program Indonesia sehat dengan pendekatan keluarga untuk 10 Kabupaten/Kota di Samarinda.
- Peningkatan kapasitas pendamping akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk 10 Kabupaten/Kota.
- Peningkatan kemampuan teknis tenaga pendamping akreditasi Laboratorium Kesehatan untuk 10 Kabupaten/Kota.

17. Program pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui kegiatan; Surveilans dan Karantina Kesehatan; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah:

- Pelacakan Kasus AFP nonPolio di 8 lokasi, workshop Kewaspadaan Dini Penyakit Berpotensi KLB untuk 10 Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan SKDR oleh 10 Kabupaten/Kota.
- Penyelidikan Epidemiologi KLB dan Wabah di 5 lokasi.
- Advokasi dan Sosialisasi Kampanye Imunisasi MR di 10 Kabupaten/Kota.
- Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) di 4 lokasi.
- Workshop terkait program P2PM di 2 Kabupaten/Kota.
- Peningkatan kapasitas SDM terkait program P2PM untuk 10 Kabupaten/Kota.
- Pertemuan Evaluasi dan Validasi data terkait program P2PM di samarinda.
- Deteksi dini faktor resiko PTM dalam mewujudkan keluarga sehat, pembekalan kader Posbindu PTM di 7 puskesmas di Kabupaten Paser.
- Pertemuan surveilans PPTM/validasi data di Samarinda.
- Skrining UBM pada anak sekolah tingkat Kabupaten/Kota di 4 Kabupaten/Kota.
- Aksi deteksi kanker leher rahim dan kanker payudara di 4 Kabupaten/Kota.
- Pelatihan deteksi dini dan penatalaksanaan gangguan jiwa bagi tenaga kesehatan di puskesmas di samarinda.
- Pelatihan penanganan dampak psikologi pada anak korban kekerasan bagi tenaga kesehatan di samarinda.

18. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan, melalui kegiatan; Peningkatan Pelayanan Kefarmasian; Peningkatan Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; Peningkatan Produksi dan



Distribusi Kefarmasian; Hasil pelaksanaan kegiatan perbekalan Gerakan Masyarakat Cerdas menggunakan Obat (GEMA CERMAT) pada stakeholder di Samarinda; Monitoring ketersediaan obat vaksin dan hasil capaian program pelayanan kefarmasian di fasyankes di seluruh Kabupaten/Kota; Sosialisasi E-monev Katalog Obat dalam mendukung perencanaan kebutuhan obat yang diikuti 10 Kabupaten/Kota; Pengadaan 150 jenis obat dan perbekalan.

19. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK), melalui kegiatan; Peningkatan Mutu SDM Kesehatan; Pelatihan SDM Kesehatan; Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Tenaga Kesehatan yang teregistrasi sebanyak 3.626 orang; Pelatihan manajemen Puskesmas di Samarinda; Pelatihan Keluarga Sehat di Samarinda; Workshop perhitungan kebutuhan SDM untuk 10 Kabupaten/Kota; Sosialisasi pembinaan dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing di daerah untuk 10 Kabupaten/Kota.
20. Program pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja, melalui kegiatan: Peningkatan Penerapan Pengupahan; Pengelolaan Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain; Penetapan UMP/UMK Tahun 2018 oleh Gubernur; Perjanjian Kerja Bersama; Peraturan Perubahaan; Perjanjian Kerja; Pembuatan Dokumen Perencanaan; Laporan; Peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal.
21. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, melalui kegiatan; Peningkatan

Kualitas Teknis Pemeriksaan dan Penyidikan Norma Ketenagakerjaan; Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja; Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:

- Sosialisasi HIV/AIDS di 60 Perusahaan dengan mengundang Perusahaan yang berada di Kabupaten/Kota.
- Pelaksanaan koordinasi dan Pelatihan singkat terhadap 21 orang untuk meningkatkan kompetensinya terkait perencanaan, pelaporan dan pelayanan K3.

22. Program peningkatan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas, melalui Pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri; Peningkatan kapasitas kelembagaan pelatihan dan produktivitas binalattas; Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri binalattas; Pengembangan standardisasi kompetensi kerja dan pelatihan kerja binalattas. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Peserta Pemagangan Dalam Negeri berjumlah 570 orang dan telah ditempatkan sebanyak 373 orang.

23. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial, melalui kegiatan: Perencanaan dan Penganggaran, dengan hasil pelaksanaan berupa Sosialisasi dan Koordinasi kegiatan Perencanaan Program.

24. Program Pemberdayaan Sosial, melalui kegiatan: Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial; Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat; Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial, dengan hasil pelaksanaan Rumah Layak Huni dan MCK dan Balai Sosial.

25. Program Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan; Pembinaan gizi masyarakat, dengan hasil: Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza; Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas; Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Dan Korban Perdagangan Orang; Rehabilitasi Sosial Anak; Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, dengan hasil terlaksananya Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Tuna Susila yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial; Lansia yang mendapatkan Rehabilitasi dan perlindungan Sosial diluar panti, Lansia yang mendapatkan Asistensi ( Pendampingan ) Sosial; Anak Balita Terlantar (ABT), Anak Terlantar (AT)/Anak Jalanan (AJ), Anak Yang berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial didalam maupun diluar panti; Pemberian Bantuan alat bantu fisik, Pelayanan Sosial keliling (UPSK).
26. Program perlindungan dan jaminan sosial, melalui kegiatan : Perlindungan sosial korban bencana alam; Perlindungan sosial korban bencana sosial; Jaminan sosial keluarga, dengan hasil terlaksananya kegiatan yaitu Pemantapan Tagana Muda sebanyak 50 Orang; Pemantapan petugas manajemen pengungsi Korban Bencana Alam sebanyak 50 Orang; Pemantapan Petugas Dukungan Psikososial Korban Bencana Alam sebanyak 50 Orang; Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kelurahan Bukit Merdeka Samboja Kabupaten Kutai kartanegara; Pengarahan Petugas Perlindungan Sosial kelokasi bencana; Pemberian insentif Tagana sebanyak 468 Orang; Penyusunan laporan rekonsiliasi logistik penanggulangan bencana sebanyak 2 kali; Melaksanakan opname gudang sebanyak 4 kali; Pengadaan logistik bagi korban bencana/kerusuhan/konflik sosial.
27. Program penanganan fakir miskin, melalui kegiatan: Penanganan fakir miskin perdesaan; Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, dengan hasil yaitu Pemberian Bantuan kepada Kelompok Usaha

Bersama (KUBE) yang berlokasi di Kota Balikpapan sebanyak 20 KUBE dan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 30 KUBE; Pemberian bantuan berupa Dana melalui Cash Transfer kepada kelompok usaha bersama di daerah perdesaan dalam rangka penambahan kebutuhan dasar masyarakat penerima bantuan.

28. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kementerian LHK, melalui kegiatan: Koordinasi kegiatan Perencanaan dan Evaluasi; Sosialisasi pembangunan kesatuan pengelolaan Hutan; Penyiapan kelembagaan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan; Pembinaan dan Pengendalian KPH oleh Tim Provinsi; Pemantauan Kesatuan Pengelolaan Hutan oleh Tim Provinsi; Biaya Operasional Penyuluh (BOP) Kehutanan; Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula Menjadi Madya; Administrasi Kegiatan, dengan hasil yaitu Pemantauan kualitas udara secara passive sampler di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Paser, Penajam Paser Utara, Berau dan Kutai Kartanegara; Pemantauan kualitas air sungai Mahakam dan anak sungai Mahakam mulai dari Kota Samarinda sampai dengan Kutai Barat; Presentase capaian sasaran strategis kementerian LHK dengan volume 90%; Meningkatkan pemahaman 30 Peserta sosialisasi tentang Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan; Tersedianya jumlah laporan hasil penyiapan kelembagaan kesatuan pengelolaan Hutan di 8 Unit KPH; Teridentifikasi jumlah laporan hasil penyiapan kelembagaan kesatuan pengelolaan Hutan di 8 Unit KPH; Teridentifikasi realisasi kegiatan di kesatuan pengelolaan Hutan di 8 Unit KPH; Membantu kelancaran kegiatan penyuluhan dilapangan sebanyak 48 orang Penyuluh kehutanan; Meningkatkan jumlah Kelompok Tani dari Pemula menjadi Madya 1 KTH (Kelompok Tani Hutan).
29. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya KKP, melalui kegiatan: Layanan manajemen keuangan, Layanan Perencanaan serta Layanan Data dan Informasi

sebanyak 5 layanan dengan hasil yaitu tercapainya Layanan Manajemen Keuangan; Layanan Perencanaan; Layanan Data dan Informasi.

30. Program pengelolaan perikanan tangkap, melalui kegiatan : Kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal, Pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran, Pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan, Pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra perikanan terpadu) yang teridentifikasi dan disiapkan pembangunannya, Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi, Nelayan yang terlindungi, Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha, Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya, Sistem informasi kenelayan yang termanfaatkan, Data dan statistik perikanan tangkap, Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumberdaya ikannya, Laut pedalaman, territorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumberdaya ikannya, Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan, Layanan dukungan manajemen Eselon I. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain:

- Kapal yang menerapkan cara penanganan ikan yang baik di atas kapal sebanyak 1 unit di Balikpapan.
- Pelabuhan perikanan yang melaksanakan kesyahbandaran sebanyak 1 lokasi di PPI Tanjung Limau.
- Pelabuhan perikanan yang menerapkan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan sebanyak 1 lokasi di PPI Manggar.
- Pelabuhan perikanan yang menerapkan sistem informasi dan keterpaduan sebanyak 1 lokasi di PPI Sangatta.
- Pelabuhan perikanan (termasuk dukungan untuk sentra perikanan terpadu) yang teridentifikasi dan disiapkan pembangunannya sebanyak 1 lokasi di Provinsi.

- Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi sebanyak 1 lokasi di Provinsi.
  - Nelayan yang terlindungi, Rumah tangga perikanan yang melakukan diversifikasi usaha sebanyak 35 Rumah Tangga Perikanan.
  - Kelembagaan usaha nelayan yang meningkat kapasitasnya sebanyak 50 kelompok.
  - Sistem informasi kenelayanan yang termanfaatkan 1 lokasi.
  - Data dan statistik perikanan tangkap 1 dokumen.
  - Perairan yang dipantau dan dianalisis pengelolaan sumberdaya ikannya 1 WPP.
  - Laut pedalaman, teritorial dan perairan kepulauan yang terkelola sumberdaya ikannya.
  - Kapal perikanan yang menerapkan logbook penangkapan ikan 10 unit.
31. Program pengelolaan perikanan budidaya, melalui kegiatan: Produksi benih yang dihasilkan di UPT dan UPTD, Kawasan budidaya yang prasarananya mampu dioperasikan secara tepat guna, Kawasan budidaya yang disurveil dan atau dimonitoring penyakit ikannya, Sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu, Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya, Layanan dukungan manajemen Eselon I, Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya, Lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya, Unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik), dengan hasil kegiatan antara lain :
- Produksi benih yang dihasilkan di UPT dan UPTD sebanyak 6 juta ekor.
  - Kawasan budidaya yang prasarananya mampu dioperasikan secara tepat guna 1 kawasan.

- Kawasan budidaya yang disurveil dan atau dimonitoring penyakit ikannya.
  - Sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu sebanyak 12 sampel.
  - Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya sebanyak 2 kelompok.
  - 13 Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya.
  - Lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya 1 lokasi di Kutai Kertanegara.
  - Unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik), dengan hasil terlaksananya Produksi Benih yang dihasilkan di UPT dan UPTD 1 lokasi.
  - Kawasan budidaya yang prasarannya mampu dioperasikan secara tepat guna.
  - Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya (kelompok; non kumulatif).
  - Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya.
32. Program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. melalui kegiatan: Operasional Speed Boat 40 hari operasi; Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan 10 kelompok; Perencanaan dan layanan dukungan manajemen eselon I sebanyak 2 layanan, dengan hasil terlaksananya Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat; Perencanaan.
33. Program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, melalui kegiatan: Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan, Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kelautan yang disusun dan

Jumlah Standar Nasional Indonesia Produk Kelautan yang diterapkan, Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan pada satker daerah. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain : Promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri yang dilaksanakan provinsi; Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan sebanyak 20 SKP; Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk kelautan yang disusun dan Jumlah Standar Nasional Indonesia Produk Kelautan yang diterapkan 1 RSNI.

34. Program pengelolaan ruang laut, melalui kegiatan Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan, Layanan dukungan manajemen Eselon I, dengan hasil terlaksananya Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan; Layanan Dukungan Manajemen Eselon I. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Provinsi yang memiliki rencana zonasi ditetapkan melalui peraturan perundangan sebanyak 1 dokumen; Layanan dukungan manajemen Eselon I sebanyak 2 layanan.

35. Program pengembangan kepariwisataan, melalui kegiatan: Peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat; Pengembangan Pasar Asia Tenggara; Peningkatan dan Pengembangan Pasar Asia Pasifik; Peningkatan dan Pengembangan Pasar Eropa, Timur tengah, Amerika dan Afrika; Peningkatan Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara; Pengembangan Kompetensi SDM Kepariwisata. Hasil Pelaksanaan kegiatan:

- Berupa workshop dan aksi saptapesona di 3 Destinasi yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kota Samarinda dengan total jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 500 orang.
- Partisipasi event promosi Kementerian Pariwisata Republik



Indonesia di wilayah Pasar Asia Tenggara dilaksanakan di Kuala Lumpur Malaysia pada event Malaysia Travel Fair (MATA Fair).

- Partisipasi event promosi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di wilayah Pasar Asia Pasifik dilaksanakan di Tiongkok/China pada event China International Travel Mart (CITM) berlangsung di Kunming, Yunnan, Tiongkok.
  - Partisipasi event promosi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di wilayah Pasar Eropa, Timur Tengah, Amerika dan Afrika yang dilaksanakan di Excel London pada event World Tourism Mart (WTM).
  - Strategi pasar nusantara ini merupakan kegiatan sosialisasi branding logo pesona indonesia yang dilaksanakan di Samarinda dengan jumlah peserta 50 orang terdiri dari berbagai kalangan.
  - Peningkatan SDM bagi guide di Kalimantan Timur dilaksanakan di Samarinda dengan jumlah peserta 260 orang.
36. Program peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi, melalui kegiatan: Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan yaitu Terlaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Program pemberdayaan Koperasi dan UKM tingkat pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebanyak 3 kali Rapat Koordinasi Program Koperasi dan UKM; Konsolidasi Data Koperasi dan UKM se-Kalimantan Timur; Pengawasan Kinerja Koperasi Se Kalimantan Timur sebanyak 50 Koperasi yang diawasi; Pendampingan Koperasi dan UKM sebanyak 19 Orang di 5 Kabupaten/Kota yaitu Samarinda, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Paser dan Berau; Fasilitasi pengembangan produk Koperasi dan UKM yang display di SMESCO Jakarta.
37. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, melalui kegiatan: Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan

dalam Rumah Tangga. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: 10 Draft Renstra penyelarasan RPJMD 2018-2023 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Kaltim; Penyelesaian 14 kasus kekerasan terhadap perempuan dan kasus kekerasan terhadap anak; Mempertahankan ISO 9001 : 2015 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota; 44 Orang fasilitator SIMFONI PPPA Kabupaten/Kota dan Provinsi; 30 peserta yang mengikuti Pelatihan sistem perlindungan Anak (SPA); 10 Forum Partisipasi Publik Perlindungan Anak Kabupaten/Kota dan 1 forum Partisipasi Publik Perlindungan Anak Provinsi; 25 peserta Pelatihan peningkatan kapasitas SDM driver PPRG dengan pendekatan three ends plus; 1 buah SOP Pusat Informasi dan Komunikasi Perempuan Penyandang Disabilitas Provinsi Kaltim; 48 pasangan calon pengantin yang mendapatkan konseling; 10 Forum anak Kabupaten/Kota dan 1 forum anak Provinsi; 30 peserta yang mendapatkan advokasi tentang indikator IPM, IDG dan IPG; 200 orang yang mengikuti sosialisasi Gerakan Sayang Keluarga (GSK); 13 Fasilitator PATBM Kabupaten/Kota; 30 orang yang mendapatkan fasilitasi kebijakan Sistem data gender dan anak; 16 peserta yang mendapatkan *capacity building* Pusat Informasi dan Komunikasi Perempuan Penyandang Disabilitas (PIKP2D); 1 forum anak Provinsi Kalimantan Timur; 150 peserta yang mengikuti pelatihan Keterlibatan Perempuan dalam Politik Bagi Pemula.

38. Program Perencanaan Pembangunan Nasional, melalui kegiatan : Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Dokumen rekomendasi kebijakan yang meliputi : Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi e-Planning Musrenbang tahun 2017 dan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD); Anugerah Pangripta Nusantara Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur tahun 2017; Rapat

Koordinasi Bappeda Se-Kalimantan Timur tahun 2017; Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Pembahasan usulan APBN dan DAK tahun 2018 dalam aplikasi e-Planning Provinsi Kalimantan Timur; Rapat koordinasi penyusunan rencana kegiatan terkait pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) di Provinsi Kalimantan Timur; Pengelolaan keuangan kegiatan dana Dekonsentrasi Kementerian PPN/Bappenas.

39. Program pengembangan perpustakaan, melalui kegiatan: Pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Pelaksanaan lomba minat baca; Pemilihan Perpustakaan terbaik; Perpustakaan Umum Terbaik; Pustakawan berprestasi; Bimbingan teknis Pengembangan Perpustakaan Desa/Kelurahan, dan pemberian stimulasi bantuan buku siap layan serta sarana berupa rak buku untuk dihibahkan kepada 9 perpustakaan di Balikpapan, Samarinda, Berau, Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Barat dan mahulu.
40. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, melalui kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV, dengan hasil program kegiatan adalah terlaksananya 31 Proyek pemantauan lapangan.
41. Program pengembangan SDM dan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan, melalui kegiatan: Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil pelaksanaan program kegiatan terisinya kekosongan tenaga pendamping profesional (TPP) baik Tenaga Ahli (TA) di Kabupaten, pendamping desa di Kecamatan dan pendamping lokal desa di desa melalui kegiatan *rekrutment* Tenaga Pendamping Profesional (TPP) tahun 2017 dengan jumlah yang berhasil dikontrak sebanyak 271 tenaga pendamping profesional; Terlaksananya pelatihan petugas tenaga Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan jumlah peserta 134 Orang;

Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas tenaga ahli (TAPM) Kabupaten/Kota dengan jumlah peserta 25 Orang; Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi Provinsi sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta tahap 1 berjumlah 169 Orang dan Tahap 2 berjumlah 152 Orang dalam rangka analisa dan evaluasi pelaksanaan penyaluran penggunaan dana desa dan program prioritas Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, terbentuknya tim koordinasi dana desa serta adanya langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul.

42. Program pembangunan daerah tertinggal, melalui kegiatan: Perencanaan dan identifikasi daerah tertinggal. Hasil pelaksanaan dengan mengadakan 5 kali rapat yang terdiri dari persiapan dan penyusunan untuk menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PPDT) Provinsi Kalimantan timur.

43. Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional, melalui kegiatan: Kebijakan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) dengan hasil monitoring tindak lanjut pengawasan kearsipan LKD ke 10 Kabupaten/Kota; Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan memfasilitasi pengangkatan jabatan fungsional melalui jalur *infassing* sebanyak 26 orang.

44. Program pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan: Pengembangan perdagangan dalam negeri daerah. Hasil pelaksanaan yaitu pengadaan pasar murah sebanyak 5 kali yang dilaksanakan pada menjelang hari-hari besar keagamaan dengan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan harga yang terjangkau.

45. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri, melalui kegiatan; melalui kegiatan penanganan permasalahan perdagangan luar negeri daerah diarahkan untuk optimalisasi pengelolaan kegiatan ekspor dan impor sehingga akan dicapai peningkatan ekspor Daerah. Dengan demikian perlu adanya koordinasi dan keselarasan kebijakan dari program yang dikeluarkan pemerintah

pusat sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dalam mengimplentasikan kebijakan dapat ditangani dan ditindaklanjuti melalui Forum Group Discussion (FGD), Sosialisasi Kegiatan, Bimtek bagi eksportir, Asosiasi dengan aparat dan instansi terkait di Samarinda, Bontang, Balikpapan dan Berau.

46. Program kepemudaan dan keolahragaan, melalui kegiatan: Pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda; Pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan; Peningkatan wawasan pemuda; Pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu Pelaksanaan Kepemimpinan Pemuda dengan peserta 50 orang; Pelaksanaan Penganggulangan Tanggap Bencana dengan peserta 100 orang; Kegiatan Organisasi Gerakan Pramuka "Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD)" Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 dilaksanakan di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan peserta masing-masing Kabupaten berjumlah 48 orang; Kegiatan Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Tengah Kabupaten Palangkaraya dengan 2 orang Pendamping dan 13 peserta jumlah 15 orang; *Try Out* yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota antara lain : Kejurnas Cabor Panahan di Surabaya peserta atlet Kalimantan Timur berjumlah 6 Orang ; Kejurnas Cabor Pencak Silat di NTB (Lombok); Kejurnas Cabor Gulat di Banten (Serang); *Try Out* PPLP/POPNAS di Semarang; Pemanduan Bakat dilaksanakan di Kutai Kartanegara, Balikpapan dan Kutai Timur.
47. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, melalui kegiatan: Pelaksanaan dukungan Perencanaan, Kerja Sama dan Hukum. Hasil pelaksanaan yaitu Tidak terlaksana kegiatan dikarenakan Juknis tidak turun sampai akhir tahun dan dana yang sudah dialokasikan dikembalikan.

### 3. Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan dana Dekonsentrasi di tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

#### a. Permasalahan:

- 1) Tidak ada Dana untuk pendamping lomba O2SNK dan pendampingan lomba FLS2N ke Tingkat Nasional untuk 10 orang pendamping.
- 2) Karena Keterbatasan Anggaran seleksi lomba-lomba Tingkat Provinsi peserta yang dipanggil dibatasi.
- 3) Kurangnya Narasumber yang hadir hingga tidak maksimalnya kegiatan Rakor tersebut.
- 4) Dengan letak sekolah yang sebagian besar jauh dari kota, maka pemantauan tidak maksimal karena keterbatasan anggaran.
- 5) Dalam melaksanakan lomba LKS Tingkat Provinsi belum semua bidang lomba yang dilombakan ditingkat nasional dapat dilomba ditingkat provinsi dikarenakan keterbatasan dana pada DIPA dana Dekonsentrasi pada setiap tahunnya sehingga bidang lomba tertentu yang bisa dilaksanakan di Provinsi.
- 6) Kegiatan yang dilaksanakan Belum mencakup semua destinasi di Kalimantan Timur.
- 7) Partisipasinya terbatas membawa materi promosi dan mitra kerja.
- 8) Branding Pesona Indonesia belum dapat dilaksanakan bersamaan dengan Branding Promosi Pemerintah Daerah.
- 9) Peningkatan SDM bagi *guide* belum melingkupi sertifikasi profesinya sebagaimana persyaratan dalam kepariwisataan.

- 10) Belum semua wilayah Kalimantan Timur memiliki jaringan internet yang memadai untuk penggunaan aplikasi *Sistem Informasi On Line* (SIMFONI ) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak sebagai dasar untuk melakukan upaya perlindungan perempuan dan anak.
- 11) Adanya mutasi pada jabatan strategis sehingga menghambat pelaksanaan SOP dalam penanggulangan tindak kekerasan.
- 12) Kurang konsisten para pengambil kebijakan dalam implementasi dan operasional Pusat Pengaduan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kabupaten/Kota.
- 13) Belum adanya wadah koordinasi pengembangan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dalam pelaksanaan PPPA.
- 14) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas udara secara *Passivesampler* belum dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur hanya baru 8 Kabupaten/Kota saja.
- 15) Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang lambat terbit sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di DLH terhambat.
- 16) Untuk pemantauan kualitas air sungai Mahakam dan anak sungai Mahakam terkadang terkendala cuaca yang tidak menentu, terkadang di perencanaan musim panas pemantauan turun kelapangan musim hujan.
- 17) Dengan adanya perubahan nomenklatur, pengelola anggaran, petunjuk operasional kegiatan (POK) dan *Self Blocking* anggaran menyebabkan harus dilakukan revisi anggaran.
- 18) Dengan adanya beberapa kali revisi tersebut, mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan.
- 19) Keterlambatan dalam penyampaian/penerbitan DIPA, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis)

kegiatan ke daerah sehingga berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan di daerah karena minimnya waktu pelaksanaan dan tidak adanya acuan untuk menjalankan kegiatan.

- 20) Ketidakselarasan kelembagaan (Dinas/Instansi/Satker) yang terdapat di Kabupaten/Kota dengan Provinsi dan Pusat yang menjadi penanggungjawab dan pelaksana di daerah, sehingga menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terkendala.
- 21) Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga pendamping Profesional desa yang sesuai komptensinya terutama di daerah daerah ekstrim.
- 22) Kurangnya pemahaman pekerja disektor informal terhadap manfaat dan teknis kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- 23) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran Norma Ketenagakerjaan melalui proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring) masih terkendala pada kemampuan Personil PPNS Pengawas Ketenagakerjaan dalam penerapannya.
- 24) Tidak semua perusahaan yang menjadi tempat pemagangan merekrut peserta pemagangan menjadi karena kesempatan kerja yang tersedia di perusahaan belum ada.

**b. Solusi:**

Dari permasalahan yang ada, langkah solusi yang masih harus dilakukan adalah oleh pemerintah maupun pemerintah daerah yaitu :

- 1) Mengusulkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah menengah kejuruan untuk mengalokasikan anggaran dana Dekonsentrasi untuk pendamping pada kegiatan lomba O2SN Dan FLS2N Tingkat Provinsi yang setiap tahunnya dilombakan pada tingkat Nasional.



- 2) Mengadakan dana sering dengan anggaran APBD untuk melaksanakan beberapa jenis lomba di tingkat provinsi dan mencari siswa yang mempunyai prestasi dibidang olah raga melalui kerjasama dengan kepala sekolah.
- 3) Berkoordinasi untuk kehadiran dari eselon I (kemendikbud) agar menyesuaikan waktu dengan kegiatan sehingga kegiatan Rakor dapat dilaksanakan sesuai penjadwalan.
- 4) Diharapkan peningkatan anggaran dari APBD Provinsi dapat membantu berjalannya program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus agar berjalan dengan maksimal terutama pada sekolah-sekolah yang jauh pada perkotaan.
- 5) Meningkatkan anggaran Dekonsetrasi agar dapat melaksanakan lomba LKS disemua bidang lomba yang ditingkat Nasional dapat dilaksanakan ditingkat Provinsi dengan maksimal.
- 6) Kegiatan workshop dan pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan berkesinambungan agar merata di sebagian destinasi wisata di Kalimantan Timur.
- 7) Perlu dukungan pendanaan yang lebih pada partisipasi event promosi pariwisata agar bisa membawa materi promosi lainnya seperti tarian dan kuliner daerah.
- 8) Perlu ditindaklanjuti untuk mem-branding promosi daerah sesuai kekhasan daerahnya.
- 9) Perlu kelanjutan terhadap peningkatan SDM *Guide* berupa sertifikasi lisensinya serta kesinambungan.
- 10) Meningkatkan koordinasi dan teknik pengelolaan SIMFONI Kabupaten/Kota melalui teknologi yang lebih sederhana.
- 11) Menetapkan Personalia sementara agar tetap melaksanakan layanan dalam bidang PPPA.
- 12) Meningkatkan kualitas koordinasi dan advokasi agar penentu kebijakan melaksanakan tugas dan peran P2TP2A.

- 13) Perlu dibentuk lembaga koordinatif bagi pengembangan pengembangan partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa, perguruan tinggi dalam pelaksanaan PPPA.
- 14) Berkoordinasi dengan KLHK melalui Dirjen Pengendalian Pencemaran untuk bisa dilakukan penambahan lokasi dan anggaran ke 2 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam ulu untuk melakukan pemantauan udara secara passive sampler.
- 15) Selalu berkoordinasi dengan Biro Perencanaan KLHK dan Dirjen terkait dalam pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- 16) Selalu berkoordinasi dengan BMKG agar melakukan pemantauan kualitas air sungai Mahakam dan Anak Sungai Mahakam sesuai dengan musim dan mengatur ulang jadwal pemantauan.
- 17) Melaksanakan percepatan kegiatan sebelum kegiatan dilakukan *Self Blocking* anggaran.
- 18) Berkoordinasi dengan BKPM agar revisi anggaran cepat disetujui.
- 19) Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan penyampaian DIPA, juklak dan juknis ke daerah secara lebih cepat dan tepat waktu.
- 20) Meningkatkan koordinasi antara Pusat dan Daerah, antar PD Provinsi, dan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota pengelola APBN secara berkelanjutan mulai dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka penguatan kapasitas aparatur dan dalam melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.
- 21) Penyesuaian Standarisasi tenaga Pendamping Profesional Desa terutama untuk daerah-daerah ekstrim.
- 22) Memberikan pemahaman kepada pekerja bahwa penetapan upah sudah sesuai regulasi PP No. 78 Tahun 2005,

mengajak pekerja untuk segera membentuk serikat pekerja di perusahaan. Melibatkan unsur BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan sosialisasi kepada pekerja formal dan informal untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- 23) Mendorong perusahaan dan pekerja agar menyusun Perjanjian Kerja Bersama seperti: Perlu secara kontinu dilaksanakan pembinaan berupa sosialisasi Peraturan terkait Norma Kerja kepada Perusahaan; Perlu diberikan pelatihan mengenai Pelaksanaan Penindakan melalui proses Tindak Pidana Ringan (Tipiring) kepada Personil PPNS Pengawas Ketenagakerjaan; Perlu disediakan anggaranyang cukup untuk perawatan kendaraan dan peralatan kerja.
- 24) Akan identifikasi terhadap kebutuhan perusahaan yang bersedia melaksanakan pemagangan sekaligus penempatannya.

### **C. Tugas Pembantuan yang diterima**

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan implementasi dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada pemberi penugasan.

#### **1. Kementerian Pemberi Tugas Pembantuan dan Perangkat Daerah yang Melaksanakan**

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 bersumber dari 8 Kementerian, dilaksanakan oleh 7 Perangkat Daerah ditingkat Provinsi dan 8 Perangkat Daerah ditingkat Kabupaten/Kota. Jumlah anggaran penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan di Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.205.734.725.000 bersumber dari APBN, meningkat di tahun anggaran 2017 yang berjumlah sebesar Rp.219.455.040.000 dengan total realisasi sebesar Rp.190,322,727,406 atau 86,73%, dapat di lihat di tabel 5.3.

Tabel 5.3.  
Realisasi Penyerapan Anggaran berdasarkan Instansi Pemberi Tugas  
Pembantuan dan Perangkat Daerah Pelaksana di Provinsi Kalimantan Timur  
tahun 2017

NO	KEMENTERIAN	PD PROVINSI	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5) : (4)
1	Kementerian Pertanian	Provinsi : (1) Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (2) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kaltim (3) Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Prov. Kaltim Kab/Kota : (1) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau (2) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten kutai kartanegara	145,115,000,000	672,498,950	89.01
2	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Provinsi : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Kaltim	1,000,000,000	20,909,734,643	81.87
3	Kementerian Sosial	Provinsi : Dinas Sosial Prov. Kaltim	2,396,080,000	1,879,634,600	95.55
4	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kab/ Kota :Dinas Kehutanan Kabupaten Berau	-	7,066,748,246	-
5	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Provinsi : Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kaltim	550,000,000	22,108,731,349	94.22
6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim	45,443,950,000	5,606,486,614	99.91
7	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Kab/ Kota : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Samarinda	950,000,000	11,715,815,766	99.45

8	Kementerian Perdagangan	Kab/Kota : (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Paser (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Berau (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur (4) Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang	24,000,000,000	1,194,609,810	46.62
<b>JUMLAH</b>			<b>219,455,030,000</b>	<b>190,322,727,406</b>	<b>86.73</b>

Sumber : Laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Anggaran Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017

## 2. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana Tugas Pembantuan yang diterima Perangkat Daerah (PD) ditingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2017 sebanyak 9 Program dan 31 kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh PD Provinsi Kalimantan Timur antara lain :

1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, meliputi kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi; pengelolaan produksi tanaman sereal; Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan; Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen tanaman pangan; Pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:
  - Bantuan benih padi inbrida di Kabupaten Berau varietas Cisantana/IR64/Ciherang dengan luasan 3.500 Ha, Kabupaten Paser varietas Mekongga/Ciherang/Cibogo dengan luasan 3.000 Ha, Kabupaten Kutai Timur varietas Ciherang/Mekongga dengan luasan 2.350 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara varietas Mekongga/ Ciherang/Cibogo dengan luasan 5.000 Ha, Kabupaten Kubar varietas Inpari/Inpara dengan luasan 1.000

Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara varietas Cimelati/Cibogo dengan luasan 3.000 Ha, Kota Samarinda varietas Ciherang/Mekongga/IR dengan luasan 64 Ha dan Kabupaten Mahakam Ulu varietas Mekongga dengan luasan 500 Ha.

- Bantuan Benih padi hibrida di Kabupaten Penajam Paser Utara varietas Simbada dengan luasan 1.000 Ha.
  - Bantuan Benih Jagung yang diberikan untuk umum lokasi Kabupaten Paser varietas Bisi 2 Jenis hibrida luasan 4.000 ha, Kabupaten Kutai Timur varietas Bisi 2 jenis hibrida luasan 899 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara varietas Bisi 2 jenis hibrida luasan 1.629 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara varietas Bisi 2 jenis hibrida dengan luasan 900 Ha dan Kabupaten Berau varietas NK 212.
  - Benih jagung yang diberikan ke Litbang dilokasi Kabupaten Kutai Timur varietas bima 9 jenis hibrida luasan 1.160 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara varietas Bima 9 luasan 1.699 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara varietas bima 9 jenis hibrida luasan 600 Ha, Kabupaten Kubar varietas bima 9 jenis hibrida luasan 1.600 Ha, Kota Samarinda varietas bima 9 jenis hibrida luasan 13 Ha.
2. Program peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura, meliputi kegiatan; Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat; Pengembangan sistem perbenihan hortikultura; Peningkatan Usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada ditjen hortikultura; Peningkatan produksi buah dan florikultura; Pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:
- Pengembangan kawasan aneka cabai dengan luasan 190 ha tersebar di Kabupaten Kutai Timur seluas 38 Ha, Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 29 Ha, Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 38 Ha, Kota Samarinda seluas 29 Ha, Kota

Balikpapan seluas 10 Ha, Kota Bontang seluas 10 Ha.

- Pengembangan kawasan cabe dalam polybag di perkotaan sebanyak 75.000 polybag tersebar di Kota Balikpapan sebanyak 50.000 polybag, Kota Bontang sebanyak 25.000 polybag.
  - Produksi Benih Buah Lainnya yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara pengembangan Manggis varietas kaligesing sebanyak 3.750 batang, Kabupaten Paser pengembangan salak varietas pondoh sebanyak 30.000 batang, Kabupaten Kutai Kartanegara pengembangan kawasan jeruk seluas 15 Ha, Kabupaten Paser pengembangan kawasan jeruk seluas 25 Ha.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, melalui kegiatan: Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian; Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:
- Jaringan irigasi tertier dengan luasan 1.100 Ha di Kabupaten Penajam Paser Utara (Kec. Waru, Kec. Babulu Darat, Kec. Sepaku dan Kec. Penajam).
  - Irigasi perpipaan/perpompaan sebanyak 11 unit yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara 3 unit, Kabupaten Kubar 2 unit, Kabupaten Penajam Paser Utara 2 unit, Kabupaten Mahulu 1 unit dan kota Samarinda 3 unit.
  - Kontruksi perluasan sawah 1.529 Ha dengan lokasi Kabupaten Paser seluas 1.000 Ha, Kabupaten Kutai Timur seluas 205 Ha, dan Kabupaten Berau seluas 324 Ha.
  - Survey Investigasi Design (SID) dengan seluas 3.500 Ha.
  - Optimasi lahan 100 Ha di lokasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

4. Program peningkatan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan, meliputi kegiatan: Pengembangan tanaman tahunan dan penyegar; Dukungan perlindungan perkebunan; Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Perkebunan; Pengembangan tanaman semusim dan rempah; Pengembangan tanaman semusim dan rempah; Dukungan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; Dukungan perbenihan tanaman perkebunan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:
- Peremajaan Tanaman Karet seluas 100 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Intensifikasi tanaman lada di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 100 Ha dan di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 200 Ha.
  - Penanganan pascapanen karet yang berlokasi di Kabupaten Kutai Barat 3 Kelompok Tani, di Kabupaten Kutai Kartanegara 3 Kelompok Tani dan di Kota Balikpapan 3 Kelompok Tani;
  - Pembangunan kebun induk tanaman lada di Kabupaten Penajam Paser Utara seluas 2 Ha.
  - Pemeliharaan kebun induk lada Provinsi tahun 2 seluas 2 Ha.
  - Pemeliharaan kebun induk tanaman aren tahun 2 di Kutai Timur seluas 5 Ha.
  - Identifikasi calon kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah seluas 5 Ha.
5. Program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan rakyat, meliputi kegiatan: Peningkatan produksi pakan ternak; Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak; Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal); Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain:



- Penanaman dan pengembangan tanaman pakan berkualitas sebanyak 1.200.000 Stek yang berlokasi di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau.
  - Penguatan pakan tambahan untuk ternak sebanyak 50 ton mencakup di Kabupaten/Kota yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau.
  - Pengendalian dan penanggulangan rabies sebanyak 20.000 Dosis yang dialokasikan untuk Kabupaten/Kota yaitu Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau.
  - Pengembangan populasi sapi potong 1 kelompok yang berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
  - Optimalisasi reproduksi sebanyak 18.942 ekor di Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Paser dan Berau.
  - Pengembangan populasi Itik 4 Kelompok di Balikpapan dan Kutai Kartanegara.
  - Penyelamatan Sapi/Kerbau Betina produktif berlokasi di Balikpapan dan Berau.
6. Program pelestarian budaya, melalui kegiatan; Pelestarian cagar budaya dan permuseuman. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain : Melakukan pendataan museum dan kepurbakalaan yang ada di Kabupaten/Sekolah se-Kalimantan Timur; Pendataan Benda Cagar Budaya dan Situs yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur; Pameran Nasional alat musik tradisional nusantara 2017 di Museum Negeri Sonobudoyo Yogyakarta; Mengikuti pameran kain tradisional nusantara di museum La Galigo (benteng Fort Rotterdam Makassar).
7. Program pemberdayaan sosial, melalui kegiatan; Pemberdayaan

komunitas adat terpencil (KAT). Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Terbangunnya Sarana (MCK); Terbangunnya Sarana Ibadah.

8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, melalui kegiatan:
  - Produksi benih yang dihasilkan di UPT dan UPTD sebanyak 6 juta ekor.
  - Kawasan budidaya yang prasarannya mampu dioperasikan secara tepat guna 1 kawasan.
  - Kawasan budidaya yang disurveilasi dan atau dimonitoring penyakit ikannya.
  - Sampel produk perikanan budidaya yang diambil minimal 96% bebas residu sebanyak 12 sampel.
  - Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya 2 kelompok.
  - Layanan dukungan manajemen Eselon I sebanyak 13 layanan.
  - Jenis pakan ikan yang terdaftar dan dipantau peredarannya 13 jenis.
  - Lokasi produsen pakan mandiri yang mendukung kawasan/sentra produksi perikanan budidaya 1 lokasi di Kutai Kertanegara.
  - Unit produsen pakan ikan bersertifikat CPPIB (Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik) dengan hasil terlaksananya Produksi Benih yang dihasilkan di UPT dan UPTD di 1 lokasi.
  - Kawasan budidaya yang prasarannya mampu dioperasikan secara tepat guna.
  - Kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana budidaya.
9. Program penyelenggaraan jalan, melalui kegiatan; Pelaksanaan preservasi dan peningkatan kapasitas jalan nasional. Hasil pelaksanaan program kegiatan antara lain: Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Samarinda sepanjang 93.83 Km dan Kota Balikpapan sepanjang 58,38 Km.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui dana

Tugas Pembantuan tahun 2017 yang diterima ditingkat Kabupaten/Kota sebanyak 3 Program dan 5 Kegiatan.

Program kegiatan melalui Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh PD di tingkat Kabupaten/Kota antara lain:

1. Program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan, melalui kegiatan: Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi; Pengelolaan produksi tanaman sereal; Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Fasilitas penerapan budidaya kedelai seluas 1.000 Ha; Fasilitas penerapan budidaya padi seluas 5.000 Ha.
2. Program peningkatan penghidupan berkelanjutan berbasis usaha mikro, melalui kegiatan: Peningkatan sarana dan prasarana pemasaran bagi usaha mikro. Hasil pelaksanaan kegiatan antara lain: Pembangunan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Koperasi sebanyak 1 unit yang berlokasi di kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran.
3. Program pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui kegiatan: Pengembangan sarana distribusi perdagangan dan kapasitas logistik perdagangan. Hasil pelaksanaan kegiatan yaitu : Terbangunnya 1 Unit Pasar Rakyat di Loktuan Bontang; Pembangunan Pasar Padang Raya di Kecamatan Rantau Pulung.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

Dalam pelaksanaan dana tugas pembantuan di tahun 2017 terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun pemerintah daerah untuk perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Beberapa permasalahan dan solusi diuraikan sebagai berikut.

#### **a. Permasalahan**

- 1) Terbatasnya kesediaan benih/bibit pakan di masyarakat.

- 2) Rendahnya sebaran dan ketersediaan hijauan pakan.
- 3) Masih adanya kasus rabies.
- 4) Pemotongan sapi/kerbau betina produktif di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Tempat Pemotongan Hewan (TPH) masih terjadi.
- 5) Masih terdapatnya kasus gangguan reproduksi ternak.
- 6) Tidak terlaksananya perluasan Tanaman Lada 25 Ha di Kabupaten Berau gagal lelang dikarenakan tidak tersedianya benih lada yang bersertifikat.
- 7) Minimnya Anggaran terhadap pembangunan sarana lingkungan (MCK).
- 8) Lokasi yang sulit dijangkau, kondisi alam/cuaca yang sulit diprediksi.
- 9) Tidak terlaksananya target sebanyak 5 orang dikarenakan tidak adanya kasus yang dirujuk untuk ditindaklanjuti.
- 10) Lembaga LKS khususnya LPKS yang terbatas sehingga didalam memberikan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial kurang Maksimal.
- 11) Khususnya RPSA yang terbentuk hanya pada UPTD-UPTD milik Pemerintah.
- 12) Kurangnya fasilitas kendaraan UPSK untuk kegiatan UPS serta kurangnya pembiayaan untuk operasional perawatan kendaraan UPSK.
- 13) Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB) kurang dukungan dari Pemerintah Daerah.
- 14) Pengerahan Petugas Perlindungan Sosial/Tagana dalam melaksanakan tugas memberikan bantuan logistik kepada korban bencana masih belum maksimal dikarenakan terkendala biaya belanja kebutuhan dasar hanya melalui dana APBN sedangkan dari dana APBD masih belum dianggarkan.

- 15) Pengadaan Logistik yang sangat minim dengan kejadian Bencana yang sangat sering terjadi dan besar dampaknya sehingga mengakibatkan pemenuhan kebutuhan dasar para korban bencana tidak maksimal.
- 16) Masih ada kelompok usaha yang pada awal pembentukan masih belum mengenal anggota kelompok satu dengan lainnya.
- 17) Belum pastinya menetapkan jenis usaha unggulan untuk kelompok.
- 18) Masih belum aktifnya beberapa pendamping untuk kelompok dampingan.
- 19) Koordinasi yang masih terbatas antara Dinas Sosial Kabupaten/Kota dengan pendamping yang ada di lapangan.
- 20) Akses Jalan menuju lokasi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang sulit ditempuh.
- 21) Kurangnya Pendamping KUBE.
- 22) Pasar Padang Raya yang berlokasi di Kecamatan Rantau Pulung masih belum bisa difungsikan karena adanya beberapa fasilitas penunjang yang belum tersedianya seperti Jaringan Listrik, Instalasi Air Bersih dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS).
- 23) Keterbatasan anggaran sehingga *Roolling Door Kios* tidak masuk RAB Kontrak, sedangkan pembangunan dituntut harus mengikuti *Prototife* dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.
- 24) Bangunan Pasar Rakyat di Loktuan Bontang masih belum bisa difungsikan dan digunakan dikarenakan sarana dan prasarana penunjang belum tersedia.
- 25) Bangunan Pasar yang terbangun sampai saat ini belum ada serah terima dari Pusat Ke Pemerintah Kota Bontang (Hibah).

- 26) Pemerintah Kota Bontang berencana akan membangun 2 (dua) unit Pasar di lokasi yang sama di daerah Loktuan tetapi sementara lahan yang dibutuhkan belum dibebaskan.

**b. Solusi**

- 1) Penyediaan produksi benih/bibit pakan secara mandiri yang dilakukan kelompok peternak.
- 2) Pembuatan lumbung pakan dan pengawetan hijauan bahan pakan atau pakan.
- 3) Melakukan pencegahan dan pengobatan vaksin rabies.
- 4) Pengawasan pengendalian sapi/kerbau betina produktif secara ketat.
- 5) mengoptimalkan reproduksi ternak.
- 6) Melakukan percepatan proses kebun induk sehingga di tahun yang akan datang kebutuhan benih bersertifikat dapat terpenuhi.
- 7) Membangun Sarana Lingkungan dengan anggaran yang tersedia.
- 8) Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan Program KAT, Membuat perencanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi lapangan.
- 9) Berkoordinasi dengan Para Pihak Terkait.
- 10) Diharapkan Kabupaten/Kota melalui Panti Swasta bisa membentuk LPKS dan RPSA.
- 11) Terkait dengan LKSA anak diharapkan sudah Terakreditasi.
- 12) Perlu adanya pemeliharaan dan perawatan kendaraan UPSK.
- 13) Perlunya Dukungan Sharing Dana dari Pemerintah Daerah setempat terkait pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB).
- 14) Perlu dukungan dana bagi petugas perlindungan sosial dalam melaksanakan tugas misi kemanusiaan ke lokasi terdampak bencana melalui anggaran perjalanan dinas.

- 15) Perlu ditambah anggaran pengadaan logistik bagi korban bencana melalui APBD sehingga kebutuhan dasar Korban Bencana dapat dipenuhi dengan maksimal.
- 16) Pembentukan Awal Kelompok Usaha ini harus dalam satu kelurahan dan masuk di dalam data BDT.
- 17) Menetapkan Komitmen yang kuat bagi pendamping kepada kelompok dampingan, sehingga berfungsi sebagai fasilitator bagi kelompok yang didampingi.
- 18) Pendamping yang ditunjuk merupakan pendamping aktif dan memiliki komitmen kerja yang kuat sehingga tidak ada *Double Job*. Hal ini memungkinkan seorang pendamping tetap fokus pada kelompok dampingannya.
- 19) Koordinasi yang harus dijalankan antara Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten/Kota maupun pendamping KUBE.
- 20) Tambahan dana dari APBD untuk Transportasi ke daerah perdesaan yang sulit di jangkau dan tidak mencukupi dengan dana APBN.
- 21) Adanya dana Tambahan dari APBD untuk Honorer Pendamping Tambahan.
- 22) Dukungan dana dari Pemerintah Provinsi sangat dibutuhkan dalam kelanjutan dan penyelesaian pembangunan Pasar Padang Raya Kecamatan Rantau Pulung di Kabupaten Kutai Timur.
- 23) Segera diadakan sarana dan prasarana Pasar seperti Bangunan Dinding Penahan, Rolling Door Kios, Blower, Power Lampu, Sanitasi Lingkungan, Pengaspalan akses masuk Pasar.
- 24) Pembangunan akan dilanjutkan secara bertahap pada tahun 2018 sesuai anggaran yang ditetapkan.
- 25) Sudah Diajukan permohonan Hibah ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri.

- 26) Pemerintah Kota Bontang sudah membebaskan Lahan sebelah Timur.